

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdulkadir, Muhammad. 2010. "Hukum Perusahaan Indonesia." *Bandung: PT. Citra Aditya Bakti*.
- Arthur Daniel P. Sitorus, SH., AAAIK., CLA. 2022. "Mengenal Istilah Hukum Piercing The Corporate Veil." *Indonesiare.Co.Id*.
- Asikin, Amiruddin-Zainal. 2012. "Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT." *RajaGrafindo Persada* 118.
- Diah, Marwah M. 2003. "Restrukturisasi BUMN Di Indonesia: Privatisasi Atau Korporatisasi?" (*No Title*).
- Dirdjosisworo, Soedjono. 1997. *Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-Bentuk Perusahaan (Badan Usaha) Di Indonesia*. Mandar Maju.
- Fuady, Munir. 2003. *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*. Citra Aditya Bakti.
- Gabrillin, Abba. 2019. "Menurut Hakim, Karen Agustiawan Terbukti Menguntungkan Korporasi Rp 568 Miliar." *Komapas.Com*.
- Hadi Subhan, M. 2008. "Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, Dan Praktik Di Peradilan." *Jakarta: Kencana Prenada Media Grup*.
- Harahap, Agus Salim. 2008. "Tanggung Jawab Direksi Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas." *Lex Jurnalica* 5(3):18077.
- Harahap, Yahya. 2021. *Hukum Perseroan Terbatas*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).
- Harun, Refly. 2019. *BUMN Dalam Sudut Pandang Tata Negara: Privatisasi, Holdingisasi, Kontrol, Dan Pengawasan*. Balai Pustaka.
- Ilmar, Aminuddin. 2012. *Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN*. Kencana.
- Indonesia, Pedoman Umum Good Corporate Governance. 2006. "Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG)."
- Juliani, Henny. 2016. "Pertanggungjawaban Direksi BUMN Terhadap Perbuatan Yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara." *Masalah-Masalah Hukum* 45(4):299–306.
- Khairandy, Ridwan, and Pokok-Pokok Hukum Dagang. 2014. "Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press."
- Muhaimin, Muhaimin. 2020. "Metode Penelitian Hukum." *Dalam S. Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram*.
- Muladi, Arief, and Barda Nawawi. 1998. "Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana."
- Mulyana, Asep N. 2018. *Business Judgment Rule: Praktik Peradilan Terhadap*

Penyimpangan Dalam Pengelolaan BUMN/BUMD. Grasindo.

- Nababan, Hotasi. 2015. "Hukum Tanpa Takaran: Penjara Korupsi Bagi Korban Penipuan."
- Nadapdap, Binoto. 2012. "Hukum Perseroan Terbatas." *Jakarta: Permata Aksara.*
- Nazir, Moh. 2003. "Metode Penelitian Cetakan Kelima." *Jakarta: Ghalia Indonesia.*
- Nomor 19, Undang-Undang. 19AD. "Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara."
- Prayoko, Robert. 2015. "Doktrin Business Judgement Rule Aplikasinya Dalam Hukum Perusahaan Modern." *Yogyakarta: Graha Ilmu.*
- Purwosutjipto, H. M. N. 2002. "Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia."
- Rastuti, Tuti, Seluk Beluk Perusahaan, and Hukum Perusahaan. 2015. "PT Refika Aditama."
- Rony Harnitijo, S. 1990. "Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri." *Ghalia Indonesia, Jakarta.*
- Silalahi, Udin. 2005. *Badan Hukum Dan Organisasi Perusahaan.* Badan Penerbit Iblam.
- Soekanto, Soerjono. 2006. "Pengantar Penelitian Hukum." (*No Title*).
- Supramono, Gatot. 2016. *BUMN Ditinjau Dari Segi Hukum Perdata.* PT Rineka Cipta.
- Sutan Remy Sjahdeini, S. H. 2016. *Sejarah, Asas, Dan Teori Hukum Kepailitan (Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran).* Kencana.
- Widjaja, Gunawan. 2008. "150 Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas." in *Jakarta: Forum Sahabat.*
- Zed, Mestika. 2008. *Metode Penelitian Kepustakaan.* Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Zulmawan, Wawan. 2019. *Business Judgment Rule BUMN.* Jala Permata Aksara.
- Agustina, Rina Sari. 2020. "PENGAWASAN BADAN USAHA MILIK NEGARA OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DITINJAU DARI HUKUM BISNIS DAN HUKUM TATA NEGARA (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XVI/2018)."

Jurnal :

- Hadi, Shigeko, Aam Suryamah, and Anita Afriana. 2021. "Prinsip Business

Judgement Rule Dalam Pertanggungjawaban Hukum Direksi BUMN Yang Melakukan Tindakan Investasi Yang Mengakibatkan Kerugian.” *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 4(2):171–90.

Gabrillin, Abba. 2019. “Menurut Hakim, Karen Agustiawan Terbukti Menguntungkan Korporasi Rp 568 Miliar.” *Komapas.Com*.

Harahap, Putri Sari, and Tumanggor Tumanggor. 2015. “Penerapan Asas Piercing The Corporate Veil: Perspektif Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas.” *Jurnal Nuansa Kenotariatan* 1(1):45–51.

Juliani, Henny. 2016. “Pertanggungjawaban Direksi BUMN Terhadap Perbuatan Yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara.” *Masalah-Masalah Hukum* 45(4):299–306.

Harahap, Agus Salim. 2008. “Tanggung Jawab Direksi Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas.” *Lex Jurnalica* 5(3):18077.

Kasim, Helmi. 2017. “Memikirkan Kembali Pengawasan Badan Usaha Milik Negara Berdasarkan Business Judgement Rules.” *Jurnal Konstitusi* 14(2):440–62.

Putra Astiti, Tjokorda Istri. n.d. “Sinkronisasi Dan Diferensiasi Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Kasus-Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *Jurnal Magister Hukum Udayana* 3(2):44122.

Rajagukguk, Erman. 2007. “Pengelolaan Perusahaan Yang Baik: Tanggung Jawab Pemegang Saham, Komisaris Dan Direksi.” *Jurnal Hukum Bisnis* 26(3):15–16.

Randang, Frankiano B. 2008. “Tugas Dan Wewenang Serta Tanggung Jawab Direksi Menurut UU No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas.” *Jurnal Hukum Unsrat* 15(4):1–11.

Setyarini, Desak Made, Ni Luh Mahendrawati, and Desak Gde Dwi Arini. 2020. “Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum.” *Jurnal Analogi Hukum* 2(1):12–16.

Agustina, Rina Sari. 2020. “PENGAWASAN BADAN USAHA MILIK NEGARA OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DITINJAU DARI HUKUM BISNIS DAN HUKUM TATA NEGARA (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XVI/2018).”

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan,
Pengawasan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara

Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-2/MBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata
Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara

Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-3/MBU/03/2023 Tentang Organ dan
Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara

Makamah Agung Republik Indonesia, Direktori Putusan. 2019. "Putusan PT
JAKARTA Nomor 34/PID.TPK/2019/PT DKI Tanggal 24 September 2019 —
Pembanding/Penuntut Umum : T.M PAKPAHAN, SH., MH.
Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : T.M PAKPAHAN, SH., MH.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Ir. GALAILA KAREN KARDINAH Als
KARE." *PT. Jakarta.*